

Pengaruh Penerapan *E-Government* dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga

Jenis Sesi Paper: Full paper

Ika Yuliyana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
aikka_19@yahoo.com

Dyah Setyaningrum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
dystia_01@yahoo.com

Abstract

This objective of this research is to analyze the influence of e-government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry/Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression with samples of the Ministries/Institution in Indonesia from 2011 until 2014. The variable corruption perception is measured using integrity index results of survey integrity from KPK, while the variable e-government implementation is measured using Ranking Index Government of Indonesia (Index PeGi). The results showed that the e-government implementation negatively affect the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively affect the corruption perception. Therefore, the Ministry/Institution needs to improve administrative processes through the use of e-government and improve the performance accountability and financial accountability.

Keywords: *corruption perception, e-government, accountability, performance, finance*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) tahun 2015 yang dirilis *transparency.org*, Indonesia menempati peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 36. Skor Indonesia meningkat 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara dengan skor 34. Transparency International Indonesia menyebutkan bahwa peningkatan peringkat tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, akan tetapi Indonesia masih tergolong negara yang rentan akan kasus korupsi khususnya dalam sektor penegakan hukum dan politik (Transparency International Indonesia, 2016).

Penerapan *good government governance* menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih transparan, bersih dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintahan yang bersih. Kementerian/Lembaga merupakan penyelenggara negara yang melakukan pengelolaan anggaran dan menjalankan pelayanan publik. Sebagian besar anggaran pada APBN dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Kasus korupsi yang terjadi di Kementerian/Lembaga disebabkan karena lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam instansi tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013). Berdasarkan data penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK dalam tahap penyidikan, jumlah kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga paling tinggi bila dibandingkan dengan instansi lain.

Output pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) menyebutkan sektor pelayanan publik di Indonesia masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu diperlukan tata kelola pemerintahan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut *e-government* untuk meminimalkan tindakan korupsi. *E-government* merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, pelaku bisnis serta lembaga pemerintah lainnya dengan menggunakan teknologi informasi (Ohja, Palvia, & Gupta, 2008). *E-government* dapat mengurangi adanya asimetri informasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat anti korupsi dalam sektor publik (Asorwoe, 2014).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good government governance*. Salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana semua pimpinan instansi pemerintah dan unit kerja didalamnya harus membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga. Penilaian mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Santoso & Pambelum (2008) menyebutkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat berpengaruh dalam pencegahan *fraud*. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja diharapkan dapat meminimalkan praktek korupsi sehingga dapat mewujudkan *good governance* bagi pemerintah pusat dan daerah.

Mardiasmo (2002) menyebutkan salah satu dimensi akuntabilitas publik adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa dana publik telah dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Wujud akuntabilitas keuangan tertuang dalam laporan keuangan pemerintah, dan untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan/audit (Setiawan, 2012). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diperiksa berdasarkan hasil temuan audit dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK melakukan tugasnya berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Liu & Lin (2012) menyebutkan tujuan mendasar audit pemerintah adalah untuk memantau, memastikan dan menilai akuntabilitas keuangan pemerintah, serta berperan dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan sehingga efektif dalam menginvestigasi tindak korupsi. Temuan audit dapat menjadi indikator terhadap dugaan awal terjadinya korupsi, oleh karena itu diperlukan upaya tindak lanjut setelah audit sebagai upaya peran audit pemerintah untuk meminimalkan adanya korupsi (Liu & Lin, 2012).

Beberapa penelitian telah meneliti dampak penerapan *e-government* dan akuntabilitas terhadap korupsi. Choi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh *e-government* terhadap korupsi dengan menganalisis data antar negara (*cross country*) untuk memperoleh dampak yang lebih general. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* memiliki pengaruh dalam pengurangan korupsi. Dalam penelitian ini *e-government* dibagi kedalam tiga komponen yaitu infrastruktur telekomunikasi, partisipasi online dan layanan online. Hasil empiris menunjukkan bahwa tiga dimensi *e-government* secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan korupsi. Penerapan *e-government* dapat dianggap sebagai strategi anti korupsi, negara yang menerapkan partisipasi online, pelayanan online dan mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, akan membuat tingkat korupsi rendah.

Kim (2014) melakukan pengujian terhadap 200 negara untuk menemukan hubungan antara *e-government* dengan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi korupsi dalam pemerintahan. Dengan penerapan *e-government*

memungkinkan warga untuk mengakses informasi pemerintah, program dan jasa dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat mengurangi intervensi dari perilaku oknum pemerintah yang sewenang-wenang. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat mengurangi perilaku korup antara pegawai pemerintahan dan warga sehingga dapat meningkatkan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.

Kurniawan (2009) menyebutkan pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Akuntabilitas publik dapat ditemukan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga.

Masyitoh (2014) menguji pengaruh temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern dan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang serta tindak lanjut audit terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi serta tindak lanjut audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Sejalan dengan penelitian Liu & Lin (2012) yang menyebutkan bahwa upaya perbaikan pasca audit (*post-audit rectification effort*) berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, dimana tingginya upaya pemerintah dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan dapat menurunkan tingkat korupsi.

Azhar (2015) menganalisis pengaruh temuan audit dan tindak lanjut pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap temuan audit pada Kementerian/Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi. Tindak lanjut temuan audit berpengaruh negatif terhadap korupsi di Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu perlu pemanfaatan hasil audit BPK sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga perlu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memilih Irjen dengan latar belakang yang sesuai sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi.

Penelitian tentang pengaruh *e-government* terhadap korupsi selama ini menggunakan data antar negara (*cross country*). Masih sedikit penelitian yang menggunakan unit analisa pemerintah daerah, dan belum ada penelitian yang menggunakan unit analisa Kementerian/Lembaga. Penelitian ini

menggunakan ukuran variabel *e-government* berupa Indeks Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGi) yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi penerapan *e-government* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dimensi pemeringkatan *e-government* Indonesia dievaluasi berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) suatu instansi pemerintah.

Variabel tingkat korupsi dalam penelitian sebelumnya diukur berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) dan jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Variabel tingkat korupsi dalam penelitian ini diukur berdasarkan hasil Survei Integritas Layanan Publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengukuran tersebut diharapkan memberikan hasil lebih baik dikarenakan Survei Integritas (SI) KPK menghasilkan Indeks yang mengukur integritas layanan publik suatu instansi sebagai upaya pencegahan korupsi yang efektif. Indeks integritas mencerminkan upaya unit layanan pada Kementerian/Lembaga dalam perbaikan dan peningkatan integritas. Selain itu indeks integritas juga mencerminkan fakta korupsi dalam layanan publik yang merupakan salah satu fungsi Kementerian/Lembaga. Pengukuran korupsi menggunakan indeks yang berasal dari survei sudah dipastikan menggunakan sampel yang representatif, data dikumpulkan dengan baik dan telah diuji validitas dan realibilitasnya (Elbahnasawy, 2008).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan *e-government*, akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di Kementerian/Lembaga. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif penerapan *e-government*, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan terhadap persepsi korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga.

2. Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan menyebutkan kontrak antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi dimana *principal* membuat suatu kontrak dengan *agent*, agar *agent* melakukan pekerjaan sesuai keinginan *principal* dengan mendelegasikan pengambilan keputusan untuk *agent* (Jensen & Meckling,

1976). Masalah keagenan muncul saat *principal* mendelegasikan wewenangnya kepada *agent* dalam pengambilan keputusan, dikarenakan tidak selalu *agent* bertindak sesuai keinginan *principal* (Groenendijk, 1997). Teori keagenan mengakibatkan masalah asimetri informasi dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* sehingga berpotensi menyebabkan *moral hazard* dan *adverse selection* (Latifah, 2010).

Teori keagenan dalam sudut pandang pemerintah dan masyarakat yaitu pemerintah selaku *agent* bagi masyarakat (*principal*) dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan memiliki akses langsung dan informasi lebih banyak dari pada *principal*, sehingga terjadi asimetri informasi yang menyebabkan tindakan korupsi dilakukan oleh oknum pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat selaku *principal* menuntut akuntabilitas pemerintah atas kinerjanya, sehingga salah satunya perlu dilakukan audit.

Menurut Klitgaard (1988), korupsi sama dengan monopoli ditambah kelonggaran wewenang (*discretion*) yang besar dikurangi akuntabilitas. Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

dimana :

C : *Corruption* (korupsi)

M : *Monopoli* (monopoli)

D : *Discretion*

A : *Accountability* (akuntabilitas)

Dengan demikian, korupsi terjadi dikarenakan pejabat mempunyai kekuasaan mutlak (*substantial monopoly power*) dalam mengambil keputusan, mempunyai kelonggaran wewenang yang besar dan tidak mempertanggungjawabkan tindakan mereka serta rendahnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan (Tuanakotta, 2010). Hardjaloka (2014) menyebutkan monopoli dimiliki pemerintah dalam mengendalikan dan mengakses sumber daya, sehingga pihak yang memiliki banyak akses cenderung melakukan korupsi, oleh karena itu perlu *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan akses informasi. Diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik menyebabkan bertambahnya peluang untuk melakukan korupsi. Sedangkan minimnya akuntabilitas terlihat dari pengambilan keputusan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Korupsi dalam definisi tersebut akan berkurang apabila

dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam pemerintah, adanya pengendalian internal yang kuat dan berkurangnya diskresi pejabat dalam mengambil keputusan sendiri (Klitgaard, 1988).

2.1. Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Persepsi Korupsi

E-government merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* merupakan alat yang efektif dalam mengurangi korupsi dikarenakan dapat memperluas akses informasi, menyederhanakan aturan dan prosedur sehingga lebih transparan, mengurangi kekuasaan diskresi dan meningkatkan akuntabilitas (Elbahnasawy, 2014). Menurut Teori Klitgaard (1988), korupsi terjadi dikarenakan pejabat mempunyai kekuasaan mutlak (monopoli) ditambah kelonggaran wewenang (*discretion*) yang besar serta rendahnya akuntabilitas. Dengan adanya implementasi *e-government* dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi sehingga dapat mengurangi monopoli dan diskresi pejabat dalam mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, penerapan *e-government* dapat menurunkan korupsi.

Pelayanan pemerintah menggunakan teknologi informasi tersebut menyederhanakan prosedur sehingga meminimalkan *contact* antara petugas atau panitia terhadap penerima pelayanan. Menurut Bhatnagar & Apikul (2006), aplikasi *e-government* dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui peningkatan transparansi, mudah dalam mengakses informasi, serta berkontribusi sebagai upaya anti korupsi. Inisiatif *e-government* dapat meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Nam, 2012). Dengan demikian, maka dapat meminimalkan adanya korupsi berupa pemberian suap atau gratifikasi terhadap pejabat publik.

Dimensi *e-government* di Indonesia dievaluasi berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan yang menghasilkan Indeks Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (Indeks PeGi). Indeks PeGi menunjukkan penilaian atas penerapan *e-government* pada Kementerian/Lembaga. Masing-masing dimensi penilaian tersebut menggunakan bobot penilaian yang sama karena semua dimensi penting dan saling menunjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Choi (2014) membuktikan bahwa *e-government* dapat berfungsi secara efektif dalam mengurangi tingkat korupsi di pemerintah. Indikator *e-government* dalam penelitian Choi (2014) meliputi infrastruktur telekomunikasi, partisipasi online dan layanan online.

Hasil penelitian menggunakan masing-masing dimensi *e-government* menunjukkan semua dimensi *e-government* tersebut secara statistik signifikan dapat mengurangi tingkat korupsi. Jika sebuah negara menganut partisipasi secara online, layanan online dan jika memiliki infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, maka dapat mengurangi tingkat korupsi di negara tersebut.

Hal ini serupa dengan penelitian Setyobudi (2016) yang menunjukkan *e-government* berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada 122 negara. Indeks infrastruktur telekomunikasi (*telecommunications infrastructure index*) dalam penelitian Setyobudi (2016) berpengaruh negatif dalam menurunkan persepsi korupsi di suatu negara. Infrastruktur telekomunikasi yang baik dapat memantapkan pengembangan *e-government* yang baik dan komprehensif sehingga membantu pemberantasan korupsi (Setyobudi, 2016). Sedangkan indeks sumber daya manusia (*human capacity indeks*) berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, hal tersebut dikarenakan pengukuran HCI didasarkan pada kualitas pendidikan yang kurang memperhatikan etika dan kejujuran, sehingga ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang terhadap *e-government* (Setyobudi, 2016).

Dalam penelitian Elbahnasawy (2014), *e-government* berpengaruh negatif terhadap korupsi dikarenakan penerapan *e-government* dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat pemerintah dengan masyarakat. Ketiga dimensi utama dalam *E-Government Development Indeks* (EGDI) diantaranya Indeks kualitas layanan online, indeks sumber daya manusia, serta indeks infrastruktur telekomunikasi berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi (Elbahnasawy, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut

H1. Penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi Kementerian/Lembaga

2.2. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Persepsi Korupsi

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditentukan. Akuntabilitas kinerja pada Kementerian/Lembaga terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang setiap tahun di evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Kurniawan (2009) menyebutkan pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Akuntabilitas publik tersebut tercermin dalam laporan akuntabilitas kinerja yang disusun oleh setiap

instansi. Menurut Teori Klitgaard (1988), korupsi disebabkan karena adanya pejabat yang mempunyai kekuasaan mutlak (monopoli) ditambah kelonggaran wewenang (*discretion*) yang besar disertai dengan minimnya akuntabilitas. Oleh karena itu, tingginya akuntabilitas dapat mengurangi adanya korupsi.

Menurut Santosa & Pembelum (2008), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh pada pencegahan *fraud*. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja diharapkan dapat meminimalkan praktek korupsi sehingga dapat mewujudkan *good governance* bagi pemerintah pusat dan daerah. Rasul (2003) menyebutkan tujuan mendasar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, salah satunya dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah menurut Wahyuni (2012) diharapkan memiliki fungsi utama salah satunya sebagai sarana untuk mendorong pimpinan instansi menerapkan prinsip *good governance*, manajemen modern yang taat asas serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem akuntabilitas kinerja memerlukan pengukuran kinerja yang diawali dengan perencanaan kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan visi, misi dan strategi yang tepat maka instansi pemerintah dapat menggali potensi, peluang dan mengatasi kendala yang dihadapi sehingga terwujud *good governance* yang pada akhirnya dapat mengurangi adanya korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H2. *Akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi Kementerian/Lembaga*

2.3. Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Persepsi Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan sesuai tugasnya melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Temuan atas pemeriksaan kepatuhan terhadap undang-undang dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan atau ketidakefektifan. Kementerian/Lembaga yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangannya berpotensi memiliki tingkat penyimpangan yang tinggi dan memungkinkan tindak korupsi (Azhar, 2015). Sedangkan temuan atas sistem pengendalian intern mencakup kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi, pelaksanaan APBN serta struktur pengendalian intern. Sistem pengendalian intern diperlukan oleh suatu instansi

untuk meminimalkan terjadinya kecurangan. Apabila instansi pemerintah memiliki pengendalian intern yang baik, maka sedikit kemungkinan terjadinya kecurangan.

Agency Theory menyebutkan adanya permasalahan keagenan antara *principal* dan *agent*, dimana pemerintah selaku *agent* memiliki lebih banyak informasi dari pada *principal* (masyarakat). Pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan memiliki akses langsung dan informasi lebih banyak dari pada *principal*, sehingga terjadi asimetri informasi yang salah satunya menyebabkan tindakan korupsi dilakukan oleh oknum pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat selaku *principal* menuntut akuntabilitas pemerintah, sehingga salah satunya perlu dilakukan audit. Umar (2012) menyebutkan pentingnya pengawasan sebagai upaya dalam memerangi korupsi. Diperlukan pihak ketiga yang independen (auditor) dalam mengawasi dan memeriksa agar pertanggungjawaban akuntabel. Menurut Ionescu (2014), audit pemerintah digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya sehingga dapat digunakan dalam memerangi korupsi.

Liu & Lin (2012) menemukan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi dikarenakan semakin banyak temuan audit dapat mengindikasikan banyaknya tindakan korupsi. Hasil penelitian Masyitoh (2014) yang menguji temuan audit terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah selama tahun 2008-2010 menunjukkan bahwa temuan audit atas kepatuhan terhadap Undang-Undang berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara serta potensi kerugian negara, sehingga dapat mengindikasikan terjadinya korupsi. Penelitian Azhar (2015) menunjukkan jumlah temuan audit atas pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap korupsi. Hal ini berarti hasil temuan audit dapat menjadi indikator awal dugaan korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H3. *Temuan audit atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan atas sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi Kementerian/Lembaga*

2.4. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Persepsi Korupsi

Audit merupakan perwujudan dari akuntabilitas keuangan pemerintah untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kegiatannya dalam menggunakan dana masyarakat.

Audit pemerintah bertujuan untuk mengawasi serta mengetahui tanggungjawab pemerintah atas penggunaan dana publik (Ionescu, 2014). Audit pemerintah dilakukan oleh pihak yang independen dan memiliki kompetensi profesional dalam memeriksa kinerja pemerintah sesuai standar yang telah ditetapkan (Setyaningrum, 2012). Berdasarkan *Agency Theory*, audit diperlukan untuk mengatasi adanya permasalahan keagenan. Agar *agent* selalu bertindak sesuai harapan *principal*, maka diperlukan adanya audit untuk memonitoring, mengawasi dan mengamati segala perilaku *agent*.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaannya agar ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sebagai upaya perbaikan. Setyaningrum (2015) menyebutkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan upaya perbaikan entitas yang diperiksa atas temuan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh (2014) membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah. Semakin tinggi upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil audit, menunjukkan tingginya upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga apabila upaya perbaikan dilakukan terus menerus dapat meminimalkan adanya korupsi (Masyitoh, 2014). Liu & Lin (2012) mengungkapkan bahwa upaya perbaikan pasca audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah propinsi di China, dimana upaya yang tinggi pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti menurunkan tingkat korupsi (Liu & Lin, 2012). Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian Azhar (2015), yang menemukan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi. Tindak lanjut atas hasil audit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga semakin baik tindak lanjut maka akan menurunkan tingkat korupsi (Azhar, 2015). Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menggunakan prosentase tindak lanjut pada periode tahun sebelumnya ($t-1$) dikarenakan tindak lanjut tersebut merupakan upaya perbaikan yang dilakukan suatu entitas sehingga diharapkan dengan dilakukannya tindak lanjut secara terus menerus maka korupsi pada tahun t akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H4. *Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan periode sebelumnya berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi Kementerian/Lembaga.*

3. Metodologi Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi Kementerian/Lembaga di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai 2014. Pemilihan sampel menggunakan metode purposif sampling (*purposive sampling method*) yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya (Hartono, 2013).

Adapun kriteria yang dilakukan dalam pemilihan sampel antara lain sebagai berikut

1. Sampel merupakan instansi Kementerian/Lembaga
2. Kementerian/Lembaga yang sudah menerapkan *e-government* dan memiliki Indeks pemerinkatan *e-government* (indeks PeGi) yang dilakukan oleh Kemkominfo.
3. Kementerian Lembaga yang memiliki Indeks Integritas, yang merupakan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2011 sampai 2014.
4. Kementerian/Lembaga yang telah dievaluasi sistem akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PAN dan RB, dan memiliki skor akuntabilitas kinerja.
5. Kementerian/Lembaga yang telah dilakukan pemeriksaan atau audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh dari pihak lain. Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi yang memberikan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi serta instansi yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data *panel (unbalanced)*, yang merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*, namun jumlah observasinya tidak sama setiap tahun untuk setiap instansi (Gujarati & Porter, 2013). Sumber data tersebut diperoleh dari beberapa pihak yang memberikan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi serta terkait dengan varibel penelitian antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.3. Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah persepsi korupsi yang diukur dengan Indeks Integritas hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Variabel ini diukur dengan cara melakukan *transpose* pada nilai Indeks Integritas. *Transpose* dilakukan untuk menyesuaikan dengan hipotesis dan memudahkan pemahaman (Elbahnasawy, 2014; Setyobudi, 2016). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penerapan *e-government*, dan akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Dimana akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Variabel penerapan *e-government* diukur berdasarkan Indeks Pemingkatan *e-government* Indonesia (Indeks PeGi) yang merupakan hasil evaluasi penerapan *e-government* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Temuan audit diukur berdasarkan jumlah kasus temuan atas Sistem Pengendalian Intern dan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan (Setyaningrum, 2015). Sedangkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut yang telah sesuai ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi yang diberikan oleh BPK (Azhar, 2015).

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran pemerintah dan belanja pegawai. Ukuran pemerintah diukur menggunakan logaritma natural total pendapatan Kementerian/Lembaga. Sedangkan belanja pegawai diukur berdasarkan logaritma natural jumlah belanja pegawai.

3.4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka hipotesis penelitian tersebut akan diuji menggunakan model ekonometri sebagai berikut

$$KRP_{it} = a + \beta_1 EGOV_{it} + \beta_2 AKIN_{it} + \beta_3 TMA_t + \beta_4 TLRHP_{t-1} + \beta_5 REV_{it} + \beta_6 BPG_{it} + e_{it}$$

dimana:

KRP : indeks integritas

a : konstanta

EGOV	: penerapan <i>e-government</i>
AKIN	: skor akuntabilitas kinerja
TMA	: temuan audit BPK
TLRHP	: tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
REV	: ukuran pemerintah
BPG	: belanja pegawai
$\beta_1 - \beta_6$: koefisien regresi tiap variabel independen
t	: periode tahun berjalan
t ₋₁	: periode tahun sebelumnya
e _{it}	: faktor pengganggu/kesalahan (<i>error</i>)

Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas (variabel independen dan variabel kontrol) terhadap satu variabel terikat (variabel dependen) (Gujarati & Porter, 2013). Analisis regresi dilakukan dengan software STATA 13. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap model untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan dalam model regresi.

3.5. Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dilakukan dengan menggunakan kelima dimensi *e-government* untuk mengetahui dimensi apa dalam *e-government* yang paling berpengaruh dalam penurunan persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Pengujian ini menggunakan model pengujian yang dilakukan oleh Choi (2014) yang menguji secara terpisah menggunakan masing-masing dimensi dalam *e-government* untuk mengetahui efek individual dan mengetahui implikasi lebih luas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kementerian Lembaga di Indonesia, masing-masing sebanyak 79 Kementerian/Lembaga pada tahun 2011 dan masing-masing sebanyak 86 Kementerian/Lembaga pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Tabel 2 menunjukkan proses pemilihan

sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun proses pemilihan sampel akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2 Proses Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Kementerian/Lembaga				Observasi
	2011	2012	2013	2014	
Jumlah Kementerian/Lembaga di Indonesia (Tahun 2011-2014)	79	86	86	86	337
Kementerian/Lembaga yang tidak memiliki Indeks PeGi	(52)	(57)	(34)	(34)	(177)
	27	29	52	52	160
Kementerian/Lembaga yang tidak memiliki Indeks Integritas	(13)	(15)	(31)	(37)	(96)
Sampel penelitian	14	14	21	15	64

Tabel 3 menggambarkan hasil statistik deskriptif sampel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan gambaran data berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*) dan standar deviasi.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Keseluruhan

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Dependent					
krp	64	2.980313	0.59508	2.23	4.61
Independent					
egov	64	2.685781	0.41892	1.86	3.57
akin	64	66.13203	6.95683	51.73	80.69
tma	64	36.39063	20.41367	2	110
tlrhp	64	0.5863281	0.23595	0.075	1
Control					
rev (juta Rp)	64	1,037,473.97	1.26611	901.89	1,151,682,141.18
bpg (juta Rp)	64	1,004,147.46	5.28685	47,310.59	25,764,018.43
Keterangan: krp : persepsi korupsi; egov : indeks PeGi (penerapan <i>e-government</i>) ; akin : skor akuntabilitas kinerja; tma : temuan audit; tlrhp: tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; rev : ukuran pemerintah; bpg : belanja pegawai					

Berdasarkan tabel 3 tersebut, rata-rata persepsi korupsi pada sampel sebesar 2.98. Sedangkan penerapan *e-government* mempunyai nilai rata-rata sebesar 2.68. Hal tersebut menunjukkan rata-rata peta kondisi kesiapan dalam penerapan *e-government* sudah berjalan dengan baik. Variabel akuntabilitas kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 66.13, dimana menggambarkan instansi telah menerapkan manajemen kinerja dengan baik. Rata-rata temuan audit pada sampel sejumlah 36

temuan. Sedangkan rata-rata jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki presentase kurang dari 70%. Hal tersebut mengindikasikan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan masih rendah.

4.2. Analisis Regresi dan Pembahasan

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas dan heterokedastisitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi. Sedangkan berdasarkan *Uji Breusch-Pagan*, menunjukkan adanya permasalahan heterokedastisitas, sehingga dilakukan tindakan korektif agar model regresi menghasilkan estimator terbaik yang tidak bias (*BLUE/Best Linear Unbias Estimator*) dengan melakukan robust menggunakan aplikasi STATA. Adapun hasil regresi dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut

Tabel 4 Hasil Regresi

Dependen : krp					
Independen	Hipotesis	Prediksi	Koefisien	P-value	Signifikan
Constanta			7.125	0.000	
egov	H ₁	-	-0.295	0.048	**
akin	H ₂	-	-0.028	0.013	**
tma	H ₃	+	0.007	0.032	**
tlrhp	H ₄	-	-0.520	0.027	**
Kontrol					
rev		+	-0.022	0.255	tidak sig
bpg		-	-0.030	0.296	tidak sig
R-Square	0.3019				
Adj R-Squared	0.2285				
Prob (F Statistic)	0.0020				
n	64				
*** Signifikan pada level 1%, ** Signifikan pada level 5%, * Signifikan pada level 10%					
Keterangan: krp: persepsi korupsi; egov : indeks PeGi (penerapan <i>e-government</i>) ; akin : skor akuntabilitas kinerja; tma : temuan audit; tlrhp: tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; rev : ukuran pemerintah; bpg : belanja pegawai					

Dari hasil regresi pada tabel 4 tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

$$KRP = 7.125 - 0.295EGOV - 0.028AKIN + 0.007TMA - 0.520TLRHP - 0.022REV - 0.030BPG + e$$

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4, menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-government* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini

berarti penerapan *e-government* dapat menurunkan persepsi para pengguna layanan publik terhadap korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penerapan *e-government* dapat meminimalkan kontak antara pengguna layanan dengan petugas sehingga dapat mengurangi adanya korupsi. Selain itu implementasi *e-government* dapat meningkatkan transparansi dikarenakan publik dapat secara langsung dan mudah mengakses informasi pemerintah. Penerapan *e-government* sebagai alat untuk mengendalikan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dikarenakan korupsi dalam birokrasi dapat dikurangi dengan transparansi melalui media elektronik (Ionescu, 2013).

Hal ini sesuai dengan penelitian Elbahnasawy (2014) yang menemukan bahwa penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap korupsi, dimana penerapan *e-government* dapat mengurangi interaksi pejabat pemerintah dengan masyarakat sehingga mengurangi kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan sendiri. Hasil ini mendukung penelitian Setyobudi (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintah dapat meningkatkan transparansi sehingga dapat digunakan sebagai sarana anti korupsi. Druke (2007) juga menyebutkan bahwa penerapan *e-government* dapat menyebabkan pemerintahan lebih transparan, interaktif, terbuka serta meningkatkan akuntabilitas, sehingga *e-government* dapat memerangi korupsi.

Menurut Choi (2014) pemanfaatan *e-government* melambangkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dikarenakan dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah kepada masyarakat melalui peningkatan transparansi sehingga dapat menurunkan korupsi. Hal ini juga sejalan dengan Kim (2014) dimana *e-government* dapat menjadi alat yang efektif dalam pengurangan korupsi. Dengan penerapan *e-government* memungkinkan warga untuk mengakses informasi pemerintah, program dan jasa dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat mengurangi intervensi dari perilaku oknum pemerintah yang sewenang-wenang (Kim, 2014). Kim (2014) juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat mengurangi perilaku korup antara pegawai pemerintahan dan warga sehingga dapat meningkatkan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.

Variabel akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan skor akuntabilitas kinerja juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada tingkat signifikansi 5%. Semakin tinggi nilai

akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga menunjukkan rendahnya persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga yang sudah menerapkan manajemen kinerja dengan baik, melalui indentifikasi kinerja, penetapan indikator kinerja, perencanaan kinerja, penyelarasan program/kegiatan, pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, pelaporan serta evaluasi kerjanya dapat menurunkan persepsi korupsi pada instansi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso & Pambelum (2008), dimana akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah merupakan upaya dalam pencegahan fraud.

Peters (2007) menyebutkan bentuk sederhana akuntabilitas adalah pertanggungjawaban administrasi organisasi terhadap apa yang telah dilakukan kepada pihak eksternal, organisasi independen serta masyarakat luas sehingga dapat dilakukan penilaian secara umum dan objektif. Oleh karena itu, dengan adanya pertanggungjawaban akan kinerja maka dapat meningkatkan transparansi publik, sehingga dapat meminimalkan adanya korupsi. Seperti halnya yang disampaikan Kurniawan (2009), dimana akuntabilitas publik yang ditemukan dalam laporan kinerja serta partisipasi masyarakat merupakan salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi. Selain itu Rasul (2008) juga mengemukakan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat mengurangi korupsi. Dalam membangun pemerintahan bersih dan terbebas dari korupsi, perlu akuntabilitas kinerja sebagai wujud dari penerapan manajemen kinerja yang *result oriented*. Penerapan manajemen kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi akan meningkatkan kinerja instansi sehingga dapat meminimalkan adanya korupsi.

Variabel temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi di Kementerian/Lembaga pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini dikarenakan temuan audit dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian keuangan negara, ketidakekonomisan dan ketidakefektifan. Selain itu temuan audit juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam sistem pengendalian intern organisasi. Temuan audit yang menyebabkan potensi kerugian negara merupakan akibat dari penyalahgunaan dan tidak efisiennya pengelolaan anggaran, sehingga beberapa temuan ditindaklanjuti dalam audit investigatif apabila terdapat indikasi kasus korupsi (Setyaningrum, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Liu & Lin (2012) yang menunjukkan deteksi upaya penipuan berpengaruh positif terhadap

korupsi. Semakin banyak temuan oleh auditor, dapat mengindikasikan adanya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah di China (Liu & Lin, 2012).

Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian Azhar (2015) yang menemukan bahwa jumlah temuan audit atas efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, dikarenakan hasil temuan audit dapat menjadi indikator awal dugaan adanya korupsi. Temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh pada indeks persepsi korupsi dikarenakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan kerugian negara dan potensi kerugian negara sehingga dapat mengindikasikan adanya korupsi (Masyitoh, 2014).

Variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di Kementerian/Lembaga pada tingkat signifikansi 5%. Semakin tinggi upaya instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan upaya perbaikan yang tinggi terhadap hasil temuan, sehingga dapat mengurangi adanya kecenderungan untuk korupsi. Hal ini sesuai dengan penelitian Liu & Lin (2012) yang menemukan bahwa upaya perbaikan pasca audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah propinsi di China, dimana upaya yang tinggi pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti menurunkan tingkat korupsi (Liu & Lin, 2012). Hasil pengujian ini mendukung penelitian Masyitoh (2014), dimana tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah. Semakin tinggi upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil audit, menunjukkan bahwa tingginya upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga apabila upaya perbaikan dilakukan terus menerus dapat meminimalkan adanya korupsi (Masyitoh, 2014). Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian Azhar (2015), yang menemukan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi. Tindak lanjut atas hasil audit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga semakin baik tindak lanjut maka akan menurunkan tingkat korupsi (Azhar, 2015).

Variabel kontrol ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besarnya ukuran pemerintah tidak serta merta dapat meningkatkan korupsi,

dikarenakan ada beberapa bukti empiris juga yang menemukan hubungan terbalik dimana ukuran pemerintah yang besar dapat menurunkan korupsi (Huther & Shah, 2000). Semakin besar ukuran pemerintah menunjukkan birokrasi yang semakin kompleks dan sumber daya yang besar sehingga entitas lebih meningkatkan pengawasan internal dan memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan pengendalian internal (Doyle, Ge, & McVay, 2007).

Variabel belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Huther & Shah (2000) juga menemukan beberapa bukti empiris yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara peningkatan gaji pegawai sektor publik dengan penurunan korupsi. Dalam lingkungan masyarakat yang korup, meningkatkan upah sektor publik hanya akan meningkatkan biaya dan upaya korupsi berikutnya (Huther & Shah, 2000). Di Indonesia sendiri, berbagai kasus korupsi dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai jabatan dan tentu saja penghasilannya sudah besar.

4.3. Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dilakukan dengan menggunakan kelima dimensi *e-government* untuk melihat dimensi apa dalam *e-government* yang paling berpengaruh dalam penurunan persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Pengujian ini menggunakan variabel indeks integritas sebagai persepsi korupsi, dan menggunakan kelima dimensi *e-government* yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi serta perencanaan sebagai variabel independen. Dimensi dalam *e-government* tersebut merupakan inti dari penerapan *e-government* dimana memiliki bobot penilaian yang sama dalam membentuk Indeks PeGi, dimana rata-rata dari kelima dimensi tersebut menghasilkan Indeks PeGi. Choi (2014), melakukan pengujian secara terpisah pada masing-masing indeks dalam *e-government* untuk mengetahui efek individual dari masing-masing indeks dan mengetahui implikasi yang lebih luas. Berdasarkan penelitian Choi (2014) tersebut, maka dilakukan pengujian pada masing-masing dimensi dalam *e-government* secara terpisah sehingga menghasilkan 6 model pengujian.

Hasil regresi menggunakan dimensi *e-government* sebagai variabel independen dapat dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut

Tabel 5 Hasil Regresi Dimensi E-Government

Dependen : krp						
Independen	Model					
	1	2	3	4	5	6
Constant	6.886	7.041	7.270	7.470	6.894	7.610
bij	0.118 (-)					0.364 (+)
lemb		0.134 (-)				0.197 (+)
infra			0.021 (-)**			0.094 (-)*
apl				0.033 (-)**		0.131 (-)
cana					0.147 (-)	0.429 (-)
akin	0.005 (-)*	0.007 (-)*	0.017 (-)*	0.015 (-)*	0.002 (-)*	0.011 (-)**
tma	0.041 (+)**	0.045 (+)**	0.033 (+)**	0.025 (+)**	0.050 (+)**	0.027 (+)**
tlrhp	0.017 (-)**	0.029 (-)**	0.034 (-)**	0.021 (-)**	0.019 (-)**	0.025 (-)**
Kontrol						
rev	0.244 (-)	0.240 (-)	0.245 (-)	0.208 (-)	0.263 (-)	0.204 (-)
bpg	0.325 (-)	0.309 (-)	0.259 (-)	0.339 (-)	0.313 (-)	0.323 (-)
R-Square	0.2855	0.2847	0.3117	0.3228	0.287	0.286
Prob (F Statistic)	0.0044	0.0042	0.0007	0.0005	0.0080	0.0044
n	64					
*** Signifikan pada level 1%, ** Signifikan pada level 5%, * Signifikan pada level 10%						
Keterangan: krp : persepsi korupsi; bij: dimensi kebijakan; lemb: dimensi kelembagaan; infra: dimensi infrastruktur; apl: dimensi aplikasi; cana: dimensi perencanaan ; akin : skor akuntabilitas kinerja; tma : temuan audit; tlrhp: tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; rev : ukuran pemerintah; bpg : belanja pegawai						

Model (1), (2), (3), (4), dan (5) menunjukkan hasil pengujian secara terpisah menggunakan masing-masing dimensi *e-government* untuk mengetahui implikasi lebih luas berdasarkan penelitian Choi (2014). Berdasarkan tabel 4.15 tersebut, dimensi kebijakan, kelembagaan dan perencanaan pada pengujian model (1), (2) dan (5) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Pada model (3) dan (4) menunjukkan bahwa masing-masing dimensi infrastruktur dan aplikasi berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi korupsi. Sedangkan pada model (6), dimana pengujian dilakukan dengan menggunakan seluruh dimensi *e-government* menunjukkan hanya dimensi infrastruktur yang berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-government* dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Persepsi Korupsi diukur dengan Indeks

Integritas hasil Survei Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan variabel penerapan *e-government* diukur dengan indeks pemeringkatan *e-government* Indonesia (Indeks PeGi). Variabel akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, dimana temuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menggambarkan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Penerapan *e-government* akan memudahkan akses masyarakat kepada pemerintah, menyederhanakan proses pelayanan, serta meminimalkan akses antara pengguna layanan dengan petugas sehingga dapat meminimalkan adanya korupsi. Hasil pengujian tambahan dengan menggunakan kelima dimensi *e-government* menunjukkan dimensi infrastruktur berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Infrastruktur yang semakin maju akan memperluas cakupan *e-government* sehingga akan mewujudkan fase transaksi, dimana transaksi antar pemerintah dengan pegawai, masyarakat luas serta sektor bisnis dilakukan dengan *e-government*. Sedangkan pengujian tambahan menggunakan dimensi *e-government* secara individual menunjukkan dimensi infrastruktur dan aplikasi berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi.

Variabel akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat mengurangi korupsi, dikarenakan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi diperlukan akuntabilitas kinerja sebagai wujud dari penerapan manajemen kinerja yang *result oriented*. Penerapan manajemen kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi akan meningkatkan kinerja instansi sehingga dapat meminimalkan adanya korupsi.

Akuntabilitas keuangan digambarkan dengan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, dikarenakan temuan audit dapat mengindikasikan adanya korupsi. Apabila ada kecenderungan *fraud* dalam temuan audit, maka dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, sehingga kasus tersebut dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, dikarenakan semakin tinggi tindak lanjut menunjukkan upaya perbaikan pada instansi yang diaudit sehingga dapat meminimalkan adanya korupsi. Sedangkan variabel kontrol yaitu ukuran pemerintah dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi.

5.2. Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang nyata kepada berbagai pihak. Kementerian/Lembaga sebagai entitas pelayanan publik perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan tercipta transparansi publik. Selain itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan penerapan manajemen kinerja dalam instansinya serta memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya perbaikan pasca audit. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang lebih dalam memberikan bukti empiris akan pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap korupsi. Penggunaan indeks integritas sebagai ukuran persepsi korupsi sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu belum ada penelitian yang menggunakan proksi penerapan *e-government* dengan Indeks PeGi sebagai determinan korupsi.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain penggunaan indeks integritas untuk mengukur persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran langsung yang lebih kompleks. Jumlah sampel penelitian terbatas dikarenakan evaluasi *e-government* tidak dilakukan setiap tahun terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, penelitian selanjutnya dapat melakukan skoring pemeringkatan sendiri menggunakan dimensi penilaian yang ada sehingga diperoleh sampel penelitian lebih banyak. Akuntabilitas kinerja terbukti berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, selanjutnya dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan *breakdown* masing-masing komponen pembentuk skor akuntabilitas kinerja sehingga dapat diketahui komponen mana yang paling berpengaruh signifikan. Selain itu bisa dikembangkan lebih lanjut proksi dari temuan audit misalnya menggunakan ukuran spesifik yang lebih mengarah pada *fraud*, misalnya jumlah temuan BPK yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah nominal rekomendasi, agar lebih menunjukkan signifikansi pentingnya rekomendasi BPK. Pemilihan variabel makro yang dapat menjadi variabel pengendali/kontrol untuk tingkat Kementerian/Lembaga sangat terbatas. Penggunaan ukuran jumlah belanja pegawai dianggap sebagai variabel makro yang dapat mencerminkan kesejahteraan pegawai. Penelitian selanjutnya

dapat menggunakan proksi belanja pegawai dibagi dengan jumlah total pegawai sehingga lebih dapat mencerminkan kesejahteraan.

Referensi

- Asorwoe, E. (2014). Can E-Government Mitigate Administrative Corruption? An Empirical study. *Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, Vol. 3 (4), 41-47.
- Azfar, O. (2007). "Disrupting Corruption." In Performance Accountability and Combating Corruption. (A. Shah, Ed.) 255-283.
- Azhar, K. (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia. *Skripsi. Universitas Indonesia*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011.
----- (2012). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012.
----- (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013.
----- (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014.
----- (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.
- Bhatnagar, S., & Apikul, C. (2006). Fighting Corruption with e-Government Applications. *APDIP e-Note 8 / 2006*.
- Choi, J. W. (2014). E-Government and Corruption: A Cross Country Survey. *World Political Science Review*, 10(2), 217-236.
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants Of Weaknesses In Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1-2), 193-223.
- Druke, H. (2007). "Can E-Government Make Public Governance More Accountable" in Performance Accountability and Combating Corruption. (A. Shah, Ed.) 255-283.
- Elbahnasawy, N. G. (2014, May). E-Government, Internet Adoption and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, Volume 57, 114-126, ISSN 0305-750X.
- Gilardi, F. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *In ECPR General Conference*, 6-8.
- Groenendijk, N. (1997). A Principal Agent Model of Corruption. *Crime, Law and Social Change*, 27 (3-4), 207-229.
- Gujarati, D. N., & Porter, C. D. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi 5 Buku 1 ed.). (E. Mardanugraha, S. Wardhani, & C. Mangunsong, Trans.) Jakarta: Salemba Empat.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan e-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Rechtsvinding*, 3 (3).
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Huther, J., & Shah, A. (2000). *Anti Corruption Policies and Programs: A Framework For Evaluation*. Washington: World Bank.
- Ionescu, L. (2013). The Potential Role of E-Government in Mitigating Corruption. *Economics, Management and Financial Markets*, 8(3), 126-131.
- Jensen, M. C., & Meckling, H. W. (1976). Theory of the firm: Managerial. *Journal of Finance*, 3(4), 305-360.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2014, Maret). Laporan Tahunan 2013. Jakarta: Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
----- (2015, Februari). Laporan Tahunan 2014. Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2011.
----- (2013, Agustus 23). Aparat Kementerian Paling Banyak Tersangkut Korupsi. Jakarta.
----- (2014). Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 : Fakta Korupsi dalam Layanan Publik.
----- (2014). Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014.
- Kurniawan, T. (2009, Mei-Agustus). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, 116-121.

- Latifah, N. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik? *Fokus Ekonomi*, 5(2), 85-94.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5, 163-186.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masyitoh, R. D. (2014). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Tesis. Universitas Indonesia*.
- Nuswandari, C. (2009). Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Agensi. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 47-53.
- Ohja, A., Palvia, S., & Gupta, M. P. (2008). A Model for Impact of E-Government on Corruption: Exploring Theoretical Foundations. *Critical Thinking in E-governance*, 160-170.
- Peters, G. (2007). "Performance-Based Accountability" In Performance Accountability and Combating. (W. B. Publications, Ed.)
- Rasul, S. (2008). Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (1).
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14-33.
- Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi. Universitas Diponegoro*.
- Setyaningrum, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPKRI. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Setyaningrum, D. (2015). Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Disertasi*.
- Setyobudi, C. A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Indeks Persepsi Korupsi: Studi Lintas Negara. *Skripsi*.
- Transparency International Indonesia. (2016, Pebruari 17). *Corruption Perceptions Index 2015. Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik*. Retrieved from transparency Indonesia: <http://ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, T. (2012). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Variabel Konstektualnya terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Disertasi. Universitas Indonesia*.